



**RILIS KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) SPESIFIK KOMISI V DPR RI
KE KABUPATEN WAJO, PROVINSI SULAWESI SELATAN
TANGGAL 22-24 MEI 2024**

Komisi V DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 22-24 Mei 2024, yang dipimpin oleh Bapak **H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si** dan diikuti oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Bapak Harvey B. Malaihollo. Kunker tersebut dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi pasca banjir di Kabupaten Wajo, sekaligus menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo maupun masukan-masukan dari Mitra Kerja Komisi V DPR RI.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR RI melakukan pertemuan dengan Kementerian PUPR, BMKG, BASARNAS, dan Pemerintah Kabupaten Wajo, sekaligus melakukan peninjauan ke lokasi Sungai Walanae yang merupakan salah satu titik banjir. Perlu diketahui bahwa, banjir melanda Kabupaten Wajo pada Senin, 29 April dan Jumat, 3 Mei 2024, disebabkan intensitas curah hujan yang tinggi sehingga tanggul sungai jebol mengakibatkan beberapa bangunan rusak dan sekitar 40 ribu jiwa terdampak, dan terdapat 2 orang korban jiwa meninggal dunia.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Kunker Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras sangat prihatin atas musibah banjir yang melanda Kabupaten Wajo, berharap agar persoalan banjir di Kabupaten Wajo segera diatasi, terutama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk segera merumuskan strategi yang efektif serta mengoptimalkan fungsi tanggul yang berada di Sungai Cenranae dan Sungai Walanae guna mengendalikan debit air agar dapat mencegah terjadinya banjir di kemudian hari.

Komisi V DPR RI berharap semua *stakeholder* baik itu Kementerian PUPR, BMKG, Basarnas, maupun Pemda Wajo untuk saling sinergi dalam menangani banjir, sebab banjir di Kabupaten Wajo sudah menjadi langganan setiap tahun. Seharusnya sudah ada langkah kongkrit dari pemerintah melalui Ditjen SDA Kementerian PUPR dalam penanganan tanggul secara maksimal di setiap titik sungai yang menjadi lokasi rawan banjir.

Selain itu, Pemerintah harus tegas atasi perusakan hutan pada daerah tambang seperti yang terjadi di Kabupaten Luwu, perusakan hutan daerah tambang menjadi salah satu penyumbang terbesar terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan fungsi hutan tidak lagi optimal dalam mengendapkan sedimen yang terbawa dari atas gunung sehingga meningkatkan risiko banjir.

Komisi V DPR RI juga mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungan di wilayah masing-masing. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelestarian lingkungan dapat membantu mengurangi risiko terjadinya bencana alam seperti banjir. Maka dari itu, pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat setempat untuk aktif dalam menjaga lingkungan sekitar.

WAJO, 22 MEI 2024

TIM KUNKER SPESIFIK KE KAB. WAJO